

## **BAB IV**

### **TANGGAPAN DAN TINDAKAN KOMUNITAS ARAB DALAM MENYIKAPI ADANYA PARTAI ARAB INDONESIA**

#### **A. Reaksi Pro dan Kontra**

Pengakuan nasionalisme Indonesia keturunan Arab pada paruh pertama abad ke-20 tidak hanya mendapat simpati dari berbagai golongan yang ada pada masa itu. Kebanyakan dari kalangan yang simpati berasal dari golongan non-Arab di tubuh Arab sendiri menuai kontroversi yang sangat besar, ada yang pro terhadapnya dan kontra, perbedaan-perbedaan ini bukan hanya berasal dari masalah sejak kemunculan PAI bahkan jauh sebelum itu.

Pada dasarnya masyarakat Arab di Nusantara sejak awal sudah terbagi menjadi dua kelas besar, yaitu golongan Sayid dan bukan Sayid. Golongan Sayid adalah golongan yang mengaku berasal dari keturunan Nabi Muhamad SAW dari keturunannya yang hijrah ke Hadramaut sejak awal abad Hijriah. Kedua golongan ini mengorganisir diri dengan membentuk wadah perkumpulan masing-masing. *Arrabitah* adalah organisasi bentukan golongan Sayid di Nusantara untuk mewadahi setiap kegiatan mereka yang tujuannya bisa dikatakan menjadikan mereka sebuah kemewahan diri dalam artian mereka ingin memperkuat perasaan bahwa mereka adalah keturunan Nabi SAW. Berbeda halnya dengan golongan bukan Sayid yang membentuk Al-Irsyad yang memfokuskan diri dalam bidang sosial keagamaan.

Namun juga, dalam salah satu Anggaran Dasar-nya menyebutkan bahwa, golongan Sayid tidak diperbolehkan masuk dalam struktur kepengurusan Al-Irsyad.

Sebenarnya, perselisihan-perselisihan yang tidak terlihat ini adalah cara dari para golongan Sayid yang cenderung eksklusif itu. Dalam masyarakat Arab, para keturunannya banyak menganut sistem patrilineal yang berimplikasi bahwa wanita golongan Sayid tidak diperbolehkan untuk menikah dengan pria bukan Sayid. Tentu kepercayaan golongan Sayid semacam ini mendapat tanggapan yang bersimpangan dari golongan Arab lainnya, walaupun ini masuk dalam sistem agama Islam. Syaikh Ahmad Sukati pada kesempatannya berbicara di Solo mengungkapkan bahwa wanita golongan Sayid diperbolehkan menikah dengan non-Sayid. (Noer, 1982:72). Ia mengutip pendapat reformis Mesir, Rasyid Ridha yang mengatakan hukum menikah wanita golongan Sayid dengan golongan luar adalah *jaiz* (dibolehkan). Kemudian, merembet kepada gelar Sayid yang dipakai para keturunan Nabi yang mulai diprotes oleh golongan non-Sayid sampai pada budaya taqbil (mencium tangan golongan Sayid yang dilakukan oleh golongan non-Sayid). Tentu dalam hal ini, isu-isu yang tidak mengenakan terus diangkat dan terus merembet pada masalah-masalah lainnya. Padahal, pada awal pembentukan kebudayaan ini merupakan kebiasaan yang dilakukan golongan non-Sayid sendiri demi menghormati sosok utama Sang Nabi yang membawa agama Tuhan. Masalah nasionalisme keIndonesiaan mendapat kecaman dari golongan wulati, suatu golongan yang menganggap tanah Hadramaut adalah masih tanah air mereka dan kewajiban adalah pada Hadramaut. Pendapat ini bisa dikatakan sebagai alat pencucian kepercayaan dari asimilasi bahwa mereka akan tetap

berpegang pada kepercayaan leluhur. Kalau dilihat dari kenyataannya, mereka adalah keturunan yang dilahirkan di sini, di Nusantara.

Di sisi lain, secara umum kalangan nasionalis pribumi memandang nasionalisme Indonesia keturunan Arab dengan antusias dan sangat terbuka. Mengenang kembali perjuangan PAI di masa lampau, Ki Hajar Dewantoro, pendiri Taman Siswa, menulis dalam peringatan 20 tahun berdirinya PAI antara lain sebagai berikut:

“Kesadaran bangsa Indonesia keturunan Arab pada 4 Oktober 1934 peristiwa tersebut tidak saja penting bagi saudara bangsa kita yang berketurunan Arab, namun amat penting pula untuk kita semua, yang bercita-cita kesatuan bangsa dan negara Indonesia, 4 Oktober yang kini mendapat julukan “Hari Kesadaran” bagi saudara sebangsa yang berketurunan Arab itu. Ki Hajar berpendapat bahwa PAI lah partai yang dalam segala sepak terjangnya, selalu berdekatan dengan cita-cita kebangsaan. Ia juga menambahkan, “dengan begitu maka salah sama sekali, apabila mereka itu dikumpulkan dalam golongan yang kini disebut golongan minoriteit, karena mereka tidak mengasingkan diri .”

Presiden Soekarno dalam amanatnya tahun 1947 tentang bangsa keturunan Arab mengungkapkan bahwa ia sangat senang dengan keputusan AR. Baswedan yang mengajak saudara-saudaranya untuk memilih mencintai Indonesia. Dengan mencintai Indonesia, Soekarno menganggap dirinya sebagai bapak dan keturunan Arab sebagai putra-putra yang sama dengan putra-putra keturunan lainnya, semua dicintai Soekarno. Ia juga mengatakan bahwa keputusan menggabungkan diri dengan

Indonesia adalah keputusan dari mereka sendiri dan merekalah yang menentukan nasib mereka. Biarlah orang lain di luar berbicara apapun. Hatta juga menanggapi dengan rasa senang dan bangga pada Sumpah Pemuda Keturunan Arab 1934. Dalam suratnya kepada AR. Baswedan ia mengatakan bahwa sumpah itu adalah hal yang tepat dalam memenuhi kewajibannya terhadap tanah air. Kemudian ia sangat bangga dengan kiprah keturunan Arab yang berjuang dalam GAPI. Ia juga mengatakan salah apabila golongan keturunan disejajarkan dengan keturunan Cina yang dalam praktiknya masih memihak kepada bangsa RRC.<sup>1</sup>

#### **B. Perjuangan Mantan Pimpinan PAI sesudah Proklamasi**

Pada November 1945 pemerintah Indonesia mengeluarkan Maklumat pemerintah tentang partai politik. Dalam maklumat itu antara lain di anjurkan agar partai politik yang di bubarkan didirikan kembali, dalam waktu singkat berdirilah partai politik itu tetapi mantan pimpinan PAI setelah melihat bahwa semua partai politik yang berdiri kembali itu membuka pintu antara lain menerima orang keturunan Arab menjadi anggota partai itu, maka mereka memutuskan untuk membubarkan PAI dan menganjurkan semua mantan anggota PAI untuk menceburkan diri ke dalam partai sesuai dengan ideologi yang di anut masing-masing mantan anggota PAI.<sup>2</sup> Banyak diantara bekas para anggota pimpinan PAI menjadi anggota PNI, Masyumi, PSI, sampai ke PKI dengan penuh kepercayaan bahwa tujuan mereka antara lain bahwa mereka akan di akui sebagai orang Indonesia penuh, sehingga akan tercapai

---

<sup>1</sup> Muhammadridhorachman, *Partai-Arab-Indonesia-1935-1941-Peranan*. (Jakarta: UI Press, 1999), hlm 3.

<sup>2</sup>Hamid Algadri, *Suka Duka Masa Revolusi* (Jakarta: UI Press, 1991), hlm 90.

apa yang telah di perjuangkan oleh para mantan anggota partai mereka. PAI sudah bubar tidak ada lagi wadah untuk berjuang sebagai kelompok, sehingga perjuangan para mantan anggota PAI di zaman revolusi merupakan perjuangan perorangan. Ketika Syahrir diangkat sebagai ketua KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat ) Mr. Hamid Algadri diangkat sebagai anggota badan ini dan kemudian duduk dalam Badan Pekerja KNIP sampai dengan pengakuan kedaulatan. Ketika Syahrir diangkat sebagai perdana menteri A.R Baswedan diangkat sebagai menteri muda penerangan, tidak lama kemudian kabinet syahrir ini di bubarkan dan AR Baswedan di angkat menjadi delegasi Indonesia ke Mesir di bawah pimpinan H.A. Salim untuk memperjuangkan pengakuan Mesir terhadap RI.

Sementara itu perjuangan melawan Belanda terus berlangsung, bekas anggota PAI berjuang dalam partai masing-masing tanpa wadah kelompok keturunan Arab. Hal yang demikian itu rupanya disadari oleh Belanda dan dimulailah oleh mereka usaha untuk menarik keturunan Arab ke pihak mereka bersamaan dengan uasaha mereka untuk mendirikan negara boneka di seluruh Indonesia dengan mendirikan BFO (*Bijzonder Federal Overleg*) untuk menentang Republik. Pemimpin IAB (*Indo Arabische Beweging*) yang didirikan pada tahun 1939 yaitu bekas ketua IAV yang didirikan pada tahun 1930 M. B. A. Alamudi di munculkan kembali organisasi konferensi keturunan Arab di Pangkal Pinang untuk mendukung politik Belanda ala BFO untuk melawan politik Belanda ini pada tahun 1948 mantan anggota PAI di Jakarta, dan terbentuklah suatu badan dengan nama Komite Politik Kalangan Arab yang tidak saja terdiri dari keturunan Arab Indonesia tetapi juga dari orang Arab

asing dengan maksud menggalang seluruh aspirasi politik yang terdapat dalam masyarakat Arab.<sup>3</sup>

Orang-orang Arab asing ini umumnya pro-Republik antara lain karena Mesir sudah mengakui Indonesia. Negara Arab semuanya hampir bersimpati dengan Republik. Ketua liga Arab Abdurrachman Azzam adalah salah satu pendukung yang gigih karena sebagai ketua komite kalangan arab yang juga diangkat sebagai ketua, serta seorang keturunan Arab asing kelahiran India, namun dia sangat bersimpati dengan PAI dan berpengaruh di masyarakat Arab non-PAI, Mochtar B. Shechabubakar, karena tidak terdapat wadah satu politik pun maka komite ini mengkalim dirinya sebagai wadah politik untuk seluruh masyarakat Arab di Indonesia. Pada umumnya badan ini berhasil mendapatkan dukungan dari masyarakat Arab dan oleh karenanya konferensi keturunan Arab Pangkal Pinang tidak berhasil mempengaruhi keturunan Arab, juga usaha Belanda membentuk delegasi minoritas Arab di KMB dapat di gagalkan oleh Komite Politik Kalangan Arab. Semua orang keturunan Arab yang berangkat ke KMB merupakan anggota delegasi Indonesia.

Bung Hatta, Abdulkadir Assegaf, dan Yahya Alydrus dalam delegasi BFO di bawah pimpinan Sultan Pontianak, Hamid Algadri seorang keturunan Arab. Dua orang pertama adalah mantan pimpinan PAI sedangkan Alydrus adalah seorang simpatisan PAI, dalam suasana politik demikian itu Presiden Soekarno memberikan

---

<sup>3</sup>Hamid Algadri, *Islam dan Keturunan Arab Dalam Pemberontakan Melawan Belanda* (Bandung: Mizan, 1996), hlm 160.

amanat pada bangsa Indonesia keturunan Arab pada tanggal 29 Maret 1947 di Yogyakarta, presiden berkata:

“ Saya mengerti akan jiwa saudara-saudara dan mengetahui usaha saudara-saudara sebagai putra-putri Indonesia saudara-saudara mencintai saya sebagai Bapak, saya pun mencintai saudara-saudara sebagai anak-anakku sebagaimana saya mencintai tiap-tiap putra dan putri Indonesia. Lanjutkanlah usahamu dengan seikhlas-ikhlasnya dan sejujur-jujurnya dan dengan jalan mndidik diri sendiri dan mendidik kalangan Arab semuanya supaya dapat menyambut masa perjuangan baru ini dengan sebaik-baiknya”.<sup>4</sup>

Perbedaan terjadi di kalangan mantan pimpinan PAI dan mantan anggota PAI yang menghendaki penghapusan perbedaan antara keturunan Arab dan orang Indonesia asli yang selalu mereka perjuangkan sejak berdirinya PAI, maka timbul lagi kebutuhan untuk mewedahi perbedaan ini. Mantan anggota PAI menuntut agar bagi mereka berlaku sistem pasif yang berlaku untuk Indonesia asli, sistem pasif ini menentukan bahwa orang Indonesia asli dengan sendirinya otomatis menjadi warga negara Indonesia, sistem ini berlaku pula untuk keturunan Arab bagi mereka yang tidak menghendaki kewarganegaraan dapat menolak kewarganegaraan RI dalam waktu dau tahun, namun setelah dua tahun waktu ini berlalu yang menolak kewarganegaraan Indonesia hanya beberapa orang saja sedangkan semua orang

---

<sup>4</sup>Hamid Algadri, *Politik Belanda Terhadap Islam dan Keturunan Arab di Indonesia* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1988) hlm 124.

minoritas Arab menerima kewarganegaraan RI, sejak saat itu seluruh keturunan Arab adalah warga negara Indonesia.

Sekalipun perjuangan ini berhasil terasa oleh para mantan anggota PAI dalam memperjuangkan sistem pasif ini sangat kurang pengertian terutama di kalangan birokrasi tentang cita-cita keturunan Arab yang belum terealisasikan.<sup>5</sup> Mengenai periode sesudah kemerdekaan Dr. J. M. Van Der Kroef menulis mengenai orang keturunan Arab yang sejak kemerdekaan Indonesia timbul perubahan pandangan terhadap kalangan minoritas misalnya lebih aktif dalam partisipasi politik, namun dalam hal lain keturunan Arab sebelum proklamasi sudah bergerak di bidang perpolitikan.<sup>6</sup>

Sekalipun perjuangan ini berhasil, terasa oleh mantan anggota PAI dalam memperjuangkan sistem pasif ini, sangat kurang pengertian terutama di kalangan birokrasi tentang cita-cita keturunan Arab yang ditambah lagi dengan adanya ketentuan dalam Pasal 58 UUD Sementara RI yang menjamin keturunan Arab akan diberi tiga kursi jika dalam pemilihan umum berikutnya tidak ada keturunan Arab yang terpilih.

Tanggal 25 Desember 1950 di adakan konfrensi orang keturunan Arab, dan pada tanggal 26 Desember 1950 konfrensi itu mengambil keputusan membentuk badan yang diberi nama Badan Konfrensi Bangsa Indonesia keturunan Arab, menerima struktur badan konfrensi tersebut dengan rencana kerja keluar dan

---

<sup>5</sup> Ibid., hlm 135.

<sup>6</sup> Algadri, *Islam dan Keturunan Arab Dalam Pemberontakan Melawan Belanda* (Bandung: Mizan, 1996), hlm 192.



kedalam, memilih susunan sekretaris pusat yaitu Hamid Algadri, Said Bahreisj dan Hoesin Bafagih sebagai Badan Pekerja, serta pembantu di Provinsi di seluruh Indonesia yang dalam program kerja badan ini tercantum berusaha memperjuangkan supaya pasal 58 UUDS RI di hapuskan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Ibid., hlm 189.